

IMPLEMENTASI PENANGGULANGAN BANJIR ROB MELALUI PROGRAM PENYELENGGARAAN  
DRAINASE DI KECAMATAN PONTIANAK SELATAN OLEH DINAS PEKERJAAN UMUM  
**DAN PENATAAN RUANG KOTA PONTIANAK**  
**PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

Haris Dian Nugraha

NPP. 28.0839

*Asdaf Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat*  
*Program Studi Politik Pemerintahan*

Email: harisnugraha789@gmail.com

**ABSTARCT**

*This final report describes the occurrence of tidal flooding due to overflowing river water created drainage channels to prevent flood inundation on the road. The purpose of this study was to determine the implementation, supporting factors, and inhibiting factors during the implementation of Rob Flood Management through the Drainage Implementation program in South Pontianak Subdistrict by the Public Works and Spatial Planning Office of Pontianak City, West Kalimantan Province. This study uses a qualitative method with an inductive descriptive approach. The theory used is Edward III Policy Implementation with four factors that influence policy implementation. The data collection methods used in this study are primary and secondary data sources, observation, interviews, and documentation. Data analysis techniques used in analyzing data through data reduction, data presentation, and drawing conclusions. Based on the research conducted, it can be concluded that the implementation of Rob Flood Control through the Drainage Implementation program in South Pontianak District by the Office of Public Works and Spatial Planning in Pontianak City has not been running optimally. This is because there is still tidal flooding which causes puddles on the road. There are several driving and inhibiting factors in the implementation of the Rob Flood Management through the Drainage Implementation program in South Pontianak District by the Public Works and Spatial Planning Office of Pontianak City. The driving factor is the existence of Regional Regulation Number 5 of 2016 concerning the Implementation of Drainage in Pontianak City. Meanwhile, the inhibiting factor is the lack of strict sanctions against offenders who interfere with the existence of drainage channels, such as people who often litter in the drainage channels.*

***Keywords: Policy Implementation, Edward III model, Drainage Administration***

**ABSTRAK**

Laporan akhir ini menggambarkan tentang terjadinya banjir rob akibat luapan air sungai membuat saluran drainase untuk mencegah terjadinya genangan banjir di jalan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan, faktor pendukung, dan faktor penghambat saat pelaksanaan implementasi Penanggulangan Banjir Rob melalui program Penyelenggaraan Drainase di Kecamatan Pontianak Selatan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif induktif. Teori yang digunakan adalah Implementasi Kebijakan

Edward III dengan empat faktor yang mempengaruhi implementasi Kebijakan. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan sumber data primer dan sekunder, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam menganalisis data melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa implementasi Penanggulangan Banjir Rob melalui program Penyelenggaraan Drainase di Kecamatan Pontianak Selatan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pontianak belum berjalan dengan optimal. Hal ini disebabkan karena masih terjadinya banjir rob yang mengakibatkan genangan di jalan. Terdapat beberapa faktor pendorong dan penghambat dalam pelaksanaan implementasi Penanggulangan Banjir Rob melalui program Penyelenggaraan Drainase di Kecamatan Pontianak Selatan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pontianak. Faktor pendorong yaitu adanya Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Drainase Kota Pontianak. Sedangkan faktor penghambat yaitu kurang tegasnya sanksi kepada pelanggar yang mengganggu keberadaan saluran drainase seperti masyarakat yang sering membuang sampah sembarangan di saluran drainase.

**Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Model Edward III, Penyelenggaraan Drainase**

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Pemerintah Daerah menurut Undang-Undang No. 23 tahun 2014 pasal 9 tentang Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa Pemerintah memiliki tiga urusan diantaranya adalah urusan pemerintah absolut, urusan pemerintahan umum, dan urusan pemerintahan konkuren. Ketiga urusan tersebut wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sesuai otonomi daerah yang telah ditetapkan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 1 ayat 6 menyatakan bahwa “Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Untuk itu setiap daerah otonom memiliki tugas dalam melaksanakan urusan pemerintahan wajib berupa pelayanan dasar yang disesuaikan dengan keadaan daerahnya meliputi bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum & penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat serta sosial.

Pekerjaan umum dan penataan ruang merupakan aspek yang sangat penting dalam perkembangan dan penyelenggaraan Pemerintahan Negara maupun Pemerintahan Daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. salah satu tugas yang dilaksanakan adalah perumusan, penetapan, pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan drainase lingkungan. Menurut “Tribun Pontianak” pada tanggal 23 September 2019, Walikota Pontianak Edi Kamtono memberikan penjelasan bahwa Pembangunan turap pada parit itu penting dibangun secara rinci karena itu merupakan suatu sistem drainase utama pasang surut air di Kota Pontianak.

Secara hidrotopografi, Pontianak memiliki kontur topografi yang cukup datar dan rendah serta curah hujan yang cukup tinggi. Kondisi ini diperparah dengan adanya pengaruh pasang surut sebagai akibat dari apa yang disebut kota sungai (riverfront city) dan kota pantai (waterfront city). Meski sempat dijuluki Kota Seribu Parit namun bukan berarti Kota Pontianak bebas dari genangan air. Parit yang menjadi aliran ini kerap meluap ketika air pasang maupun saat hujan tiba. Sistem jaringan drainase yang buruk menjadi penyebab utama terjadinya genangan banjir rob di Kecamatan Pontianak Selatan.

## **1.2. Permasalahan**

Untuk mengetahui lebih jauh bagaimana implementasi penanggulangan banjir rob melalui program penyelenggaraan drainase, faktor pendukung dan penghambat serta upaya pemerintah kota Pontianak melalui Dinas PUPR ada beberapa permasalahan yang belum dapat dilaksanakan secara optimal. Permasalahan tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Masih terjadinya banjir rob di kecamatan Pontianak Selatan.
2. Pertumbuhan penduduk yang padat.
3. Peran serta kesadaran masyarakat yang kurang peduli terhadap drainase yang ada.
4. Kurangnya pengawasan di lingkungan drainase.

Program penyelenggaraan drainase untuk penanggulangan banjir rob belum berjalan maksimal disebabkan karena adanya permasalahan yaitu belum maksimalnya sosialisasi mengenai Perda tentang penyelenggaraan drainase. Contoh lainnya adalah banyak masyarakat yang masih membuang sampah di saluran drainase mengakibatkan air tidak berjalan dengan lancar dan banyak masyarakat ketika ditanya mengenai Perda yang mengatur tentang drainase tidak mengerti.

## **1.3. Penelitian Sebelumnya**

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, yakni tentang penanggulangan banjir melalui program penyelenggaraan drainase. Penelitian AYS Siahaan yang berjudul Implementasi Program Pembangunan Drainase dalam upaya Penanggulangan Banjir Kota Medan (Siahaan AYS, 2019) menemukan bahwa penyelenggaraan sistem drainase bertujuan untuk membebaskan tingkat genangan air atau banjir yang berada di wilayah agar tidak mengganggu rutinitas masyarakat. Peran Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru Dalam Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan karena masyarakat menganggap masalah drainase adalah urusan pemerintah dan menjadi tanggungjawab pemerintah saja, lahan yang kurang karena terjadinya perubahan penggunaan lahan menjadi kawasan terbangun menyebabkan lahan kedap air semakin luas sehingga penyerapan air dalam tanah menjadi relatif kecil (Susilawati 2019). Berdasarkan penelitian yang berjudul Implementasi program pengendalian banjir sub komponen c di kota Semarang (program perbaikan sistem drainase kali Semarang) menyatakan bahwa Salah satu upaya yang dapat dilakukan Pemerintah Kota Semarang adalah program pengendalian banjir melalui perbaikan drainase Kali Semarang tentang pengendalian banjir yang bertujuan untuk mendeskripsikan pengendalian banjir melalui drainase (YB Persada A Rengga Maesaroh Maesaroh, 2015). Penanggulangan banjir melalui program penyelenggaraan drainase di Kota Pekanbaru juga dilakukan agar sistem ini memainkan fungsi penting untuk menciptakan lingkungan yang sehat dan menjelaskan tentang pengelolaan penataan drainase yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian. (Fawahid A Mashur D, 2016). Berdasarkan penelitian yang berjudul Implementasi Program Pembangunan Drainase sebagai Public Goods di Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Kabupaten Asahan Drainase merupakan serangkaian bangunan air yang berfungsi untuk mengurangi atau membuang kelebihan air agar suatu daerah dapat difungsikan secara optimal serta berfungsi untuk pengendalian banjir (Lubis, Y Yasmin, 2019).

## **1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh peneliti terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni terkait Implementasi Penanggulangan Banjir Rob Melalui Program Penyelenggaraan Drainase Di Kecamatan Pontianak Selatan Oleh Dinas

Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Pontianak. Konteks yang dimaksud adalah banjir rob yang terjadi dapat diatasi dengan adanya drainase yang dibuat oleh Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Pontianak melalui kebijakan yang telah dibuat oleh Pemerintah.

### **1.5. Tujuan**

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana Implementasi Penanggulangan Banjir Rob Melalui Program Penyelenggaraan Drainase Di Kecamatan Pontianak Selatan Oleh Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Pontianak faktor pendukung dan penghambat serta upaya Yang Dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Pontianak untuk mengatasi Faktor Pendukung Dan Faktor Penghambat

## **II. METODE**

Dalam penulisan ini, metode yang digunakan penulis adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif dilakukan bertujuan untuk menggambarkan kejadian atau fakta yang ada dan keadaan yang terjadi saat magang riset terapan pemerintahan berlangsung. Penulis menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selain itu penulis juga menganalisis data dengan beberapa langkah yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Adapun analisisnya penulis menggunakan teori implementasi kebijakan yang digagas oleh Edward III dalam Dyah dan Arif (2014:38) yang menyatakan bahwa Studi implementasi kebijakan adalah krusial bagi administrasi publik termasuk di dalamnya kebijakan publik. Implementasi kebijakan adalah tahap pembuatan kebijakan antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhinya. Implementasi kebijakan telah dilaksanakan tetapi belum maksimal. Edward yang dikutip oleh Dyah dan Arif (2014: 38-44) mengemukakan pendapatnya bahwa, Terdapat empat faktor atau variabel kritis dalam implementasi kebijakan publik, yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi (sikap kecenderungan) dan struktur birokrasi.

## **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **3.1 Implementasi Penanggulangan Banjir Rob Melalui Program Penyelenggaraan Drainase Di Kecamatan Pontianak Selatan Oleh Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat**

Implementasi Kebijakan adalah sebuah penerapan dari kebijakan yang dibuat. Dalam hal ini kebijakan penyelenggaraan drainase dalam penanggulangan banjir rob. Implementasi yang dimaksud dalam magang riset terapan pemerintahan ini adalah bagaimana kebijakan yang telah dibuat diterapkan untuk penanggulangan banjir rob dan sudah dilaksanakan sepenuhnya. Sejalan dengan pendapat Edward yang dikutip oleh Dyah dan Arif (2014: 38-44) mengemukakan pendapatnya bahwa, Terdapat empat faktor atau variabel kritis dalam implementasi kebijakan publik, yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi (sikap kecenderungan) dan struktur birokrasi.

#### **1. Komunikasi**

Komunikasi yang baik terjadi karena adanya penyalur komunikasi kebijakan atau komunikator kepada komunikan dalam hal ini ialah terkait Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Drainase di Kota Pontianak. Tujuan dan sasaran dari kebijakan tersebut dapat di komunikasikan secara baik sehingga dapat menghindari adanya kekeliruan atas kebijakan dan program yang direncanakan. Hal ini menjadi penting karena semakin tinggi kekeliruan dalam mengimplementasikan kebijakan dalam ranah yang sesungguhnya maka kebijakan tersebut tidak akan terlaksana dengan baik.

**Transmisi.** Berdasarkan wawancara dengan Bapak Riza selaku Sekertaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pontianak pada 15 Januari 2021, disampaikan bahwa Informasi telah diberikan kepada aparatur di DPU secara tertulis yaitu melalui PERDA yang ada, selain itu juga melalui perintah dari walikota, atau arahan pimpinan kepada bawahannya sehingga jarang terjadi miss komunikasi. Untuk sosialisasi kepada masyarakat juga telah dilakukan. Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada masyarakat dapat diketahui bahwa sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat terkait penyelenggaraan drainase belum maksimal dibuktikan masih ada masyarakat yang belum mengerti kebijakan yang mengatur tentang penyelenggaraan drainase.

**Kejelasan.** Dimensi kejelasan dari sebuah kebijakan sangatlah penting sehingga dapat dipahami oleh pelaksana kebijakan dan tidak membingungkan. Selain itu diantara mereka dapat mengetahui apa yang harus dipersiapkan dan apa yang harus dilaksanakan agar tujuan program atau kebijakan dapat dicapai secara efektif dan efisien. Ketidak jelasan komunikasi akan berdampak pada menyelewengnya suatu tujuan dari kebijakan yang sedang diambil. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Firayanta selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pontianak pada 15 Januari 2021 mengatakan bahwa Aparatur disini sudah paham karena isi dari kebijakan tersebut sudah jelas secara tertulis dalam peraturan perundang-undangan untuk penyelenggaraan drainase yang sudah ditentukan dan kami sedang mengusahakannya.

**Konsistensi.** Konsistensi yang juga mempengaruhi keberhasilan dari komunikasi karena dapat mempengaruhi komunikasi dimana suatu perintah yang harus dilaksanakan adalah haruslah konsisten dan jelas. Karena jika perintah yang diberikan sering berubah ubah dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan. Berdasarkan wawancara Bapak Riza selaku Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pontianak pada 15 Januari 2021 mengatakan bahwa Kami sudah konsisten dalam melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan tugas masing-masing. Informasi mengenai arahan atau perintah yang ada selalu disampaikan sehingga kami dapat secara konsisten melaksanakannya sesuai tupoksinya.

## **2. Sumber Daya**

Indikator selanjutnya adalah sumber daya yang berkaitan dengan unsur yang melaksanakan kebijakan dalam penyelenggaraan drainase. Suatu kebijakan yang jelas dan konsisten akan percuma jika tidak memiliki sumber daya yang baik dalam melaksanakan perintahnya.

**Sumber Daya (Staf).** Hal yang penting dan yang paling utama untuk menopang keberhasilan kebijakan adalah adanya sumber daya manusia sebagai pelaksana kebijakan yaitu unsur staf. Kegagalan yang terjadi dalam implementasi adalah kurangnya staf baik dari segi jumlah atau kuantitas maupun segi kualitas dalam melaksanakan kebijakan sesuai dengan bidangnya. Berdasarkan wawancara Bu Evita selaku Kepala Sub Bagian Umum dan Aparatur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada 16 Januari 2021 menyatakan bahwa Kalau dibagian teknis sudah memenuhi tetapi di bagian sekretariat disini masih diisi dengan formasi lama. Di bagian administrasi kepegawaian diisi lulusan SMA dan di keuangan itu kekurangan sarjana ekonomi yang hanya diisi oleh lulusan SMA bahkan ada yang tua-tua yang latar belakang SD. Di DPU ini juga masih butuh tenaga kerja non pns yaitu sekitar 17 orang yang terdiri dari 6 orang tenaga kebersihan, 5 orang tenaga keamanan, 2 orang tenaga kerja arsip, dan 4 orang driver. tenaga kerja lapangan dirasa masih kekurangan jumlah mengingat terkait

penyelenggaraan drainase jangkauannya sangat luas sehingga terjadi ketidakseimbangan antara jumlah tenaga kerja dan beban kerja yang harus diampunya.

**Informasi.** Dalam implementasi kebijakan, informasi mempunyai dua bentuk yaitu informasi mengenai cara melaksanakan kebijakan dan informasi mengenai kepatuhan dari para pelaksana kebijakan terhadap kebijakan yang ada. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Riza selaku Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada 15 Januari 2021 mengatakan bahwa Sampai sejauh ini pelaksanaannya sudah berjalan sesuai tugasnya untuk penyelenggaraan drainase namun drainase di kecamatan pontianak selatan merupakan drainase utama yang belum maksimal dalam memenuhi dengan melakukan perencanaan, pembangunan, dan pemeliharaan drainase sesuai perdanya.

**Wewenang.** Sebuah kewenangan akan mempertegas dan memperjelas tugas dan fungsi dari pelaksana kebijakan terkait implementasi kebijakan. Wewenang yang bersifat formal dan merupakan suatu legitimasi dari para pelaksana kebijakan sesuai dengan bagiannya. Kewenangan tersebut akan memperjelas terkait tugas pokok dan fungsi dari pihak yang melaksanakan kebijakan yang ada.

**Fasilitas.** Dalam implementasi kebijakan juga diperlukan yang namanya fasilitas yaitu salah satu aspek yang dapat membantu dan mendukung staf untuk melaksanakan tugasnya. Tanpa adanya sarana dan prasarana yang baik proses pelaksanaan kebijakan tersebut akan sulit untuk dicapai. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Riza selaku Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pontianak pada tanggal 15 Januari 2021 yang menyatakan bahwa Fasilitas yang ada sudah memadai dan kami juga sudah mengajukan untuk menambahkan fasilitas tahun 2021 ini untuk bisa mendukung kinerja kami. Alhamdulillah banyak di acc ketika kami mengajukan apa yang sedang di butuhkan.

### **3. Disposisi**

Sikap dari pelaksana kebijakan diharapkan bisa melaksanakan dengan baik dan memahami terhadap tujuan dari dibentuknya sebuah kebijakan. Untuk mengimplementasikan kebijakan penyelenggaraan drainase para aparatur harus memahami kebijakan dan harus mempunyai kemampuan untuk melaksanakannya.

**Pengangkatan Birokrasi.** Orang-orang yang memiliki dedikasi akan lebih baik sebagai subjek dalam pengangkatan personil untuk melaksanakan kebijakan. Pengangkatan birokrasi merupakan faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi sebuah kebijakan. Untuk itu pengangkatan birokrasi atau tim pelaksana kebijakan harus dilakukan dengan tepat dan bisa menjadi orang-orang yang terpercaya untuk menjadi pelaksana kebijakan terkait penyelenggaraan drainase. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Evita selaku Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pontianak pada 16 Januari 2021 mengatakan bahwa Dalam pengangkatan aparatur disini sebagian besar berasal dari Badan Kepegawaian Daerah Kota Pontianak. Untuk pemilihan jabatan berdasarkan kompetensi, kualifikasi, dan syarat lainnya sesuai aturan ASN.

**Insentif.** Untuk memaksimalkan kinerja dari para pelaksana kebijakan dapat dipengaruhi dengan memberikan insentif atau biaya tertentu yang diberikan kepada para personil pelaksan kebijakan untuk meningkatkan kinerjanya. Hal ini akan membuat para aparatur termotivasi dan menambah semangat untuk melaksanakan tugasnya dengan baik sebagai pemenuhan kebutuhan pribadi dari pelaksana kebijakan. Mengenai insentif belum ada secara khusus yang

diberikan kepada aparaturnya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pontianak seperti yang dikatakan oleh Ibu Evita selaku Kepala Sub Bagian Umum dan Aparatur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pontianak pada 16 Januari 2021 mengatakan bahwa secara khusus tidak ada hadiah atau insentif kepada para pegawai. Hanya ada tpp atau pemberian tunjangan dan yang mengatur langsung adalah dari pemerintah Kota. Tiap besaran tunjangan itu tergantung dari ekselon dan golongannya.

#### **4. Struktur Birokrasi**

Dalam mengimplementasikan kebijakan penyelenggaraan drainase sangat berkaitan dan membutuhkan keterpaduan antara lembaga atau badan yang terkait menangani masalah drainase.

**SOP.** SOP merupakan standar minimum yang menjadi dasar bagi para pelaksana kebijakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan disetiap harinya dengan standar yang telah ditetapkan atau standar minimum yang dibutuhkan. SOP dapat meningkatkan kinerja struktur birokrasi untuk dilaksanakan para implementor. Dalam pelaksanaan penyelenggaraan drainase belum ada SOP yang mengaturnya secara teknis. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara dengan Bapak Firayanta selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pontianak pada 15 Januari 2021 Hingga saat ini belum ada SOP untuk penyelenggaraan drainase di Kota Pontianak hanya berpatokan pada perda saja. Tentunya kami membutuhkan SOP agar dapat memaksimalkan kinerja dan berjalan lebih teratur.

**Fragmentasi.** Fragmentasi juga mempengaruhi struktur birokrasi yang merupakan pembagian kerja atau penyebaran tanggung jawab kepada beberapa badan atau pihak berbeda yang melaksanakan kebijakan agar kebijakan tersebut dapat dicapai dengan efektif dan tepat. , Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Bapeda, merupakan stakeholders langsung di lapangan yang memegang peranan penting untuk drainase sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

### **3.2 Faktor Pendukung Dan Penghambat Implementasi Penanggulangan Banjir Rob melalui program Penyelenggaraan Drainase**

**Sumber Daya Manusia.** Adanya semangat yang dimiliki oleh petugas yang berperan dalam pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan drainase. Semangat dari setiap individu pegawai dalam menegakkan kebijakan ini maka akan mendorong terlaksananya kebijakan penyelenggaraan drainase ini dapat dilaksanakan dengan baik. Adanya respon yang baik dari masyarakat merupakan dukungan terpenting dari Kebijakan ini. Masyarakat yang banyak mendukung atau merespon baik kebijakan ini adalah kalangan masyarakat yang tinggal di dekat saluran drainase dan yang sering terkena banjir rob.

**Adanya Peraturan Daerah nomor 5 tahun 2016 tentang penyelenggaraan drainase.** Peraturan Daerah ini mendorong terciptanya lingkungan permukiman yang sehat dan bebas genangan dan menangani masalah banjir rob di Kota Pontianak. Perda ini dijadikan sebagai landasan bagi pemerintah dan semua pihak yang terkait untuk mewujudkan terciptanya penyelenggaraan drainase yang baik.

**Kurang maksimalnya Sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat.** Sosialisasi diberikan agar masyarakat mengetahui pentingnya keberadaan saluran drainase sehingga timbul kesadaran bagi masyarakat untuk menjaganya. Walaupun sosialisasi telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Pontianak tetapi belum dilakukan dengan maksimal. Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis kepada beberapa masyarakat menunjukkan bahwa masyarakat belum mengerti peraturan yang mengatur tentang drainase. Masyarakat hanya mengerti secara fisik saluran drainase tanpa landasan atau hukum yang mengaturnya.

**Tingkat pengawasan di lapangan yang masih kurang terhadap saluran drainase.**

Kegiatan pengawasan langsung di lapangan merupakan hal yang penting agar dapat memantau secara langsung bagaimana perubahan kondisi yang terjadi di lapangan dari waktu ke waktu.

### 3.3 Upaya Yang Dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Pontianak untuk mengatasi Faktor Pendukung Dan Faktor Penghambat

**Sumber Daya Manusia.** Adanya semangat yang dimiliki oleh petugas yang berperan dalam pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan drainase. Semangat dari setiap individu pegawai dalam menegakkan kebijakan ini maka akan mendorong terlaksananya kebijakan penyelenggaraan drainase ini dapat dilaksanakan dengan baik.

**Adanya Peraturan daerah Kota Pontianak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Drainase.** Peraturan Daerah ini mendorong terciptanya lingkungan permukiman yang sehat dan bebas genangan dan menangani masalah banjir rob di Kota Pontianak. Perda ini dijadikan sebagai landasan bagi pemerintah dan semua pihak yang terkait untuk mewujudkan terciptanya penyelenggaraan drainase yang baik. Kami melanjutkan adanya kebijakan yang telah dibuat oleh Daerah Kota Pontianak yang membuat kebijakan. Ini menunjukkan adanya drainase yang diperhatikan oleh Pemerintah dan menunjuk kami sebagai OPD penyelenggara kebijakan tersebut. Kebijakan ini memudahkan kami sebagai OPD yang ditunjuk agar tujuan penyelenggaraan drainase tercapai dengan baik.

### 3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

No	Judul	Peneliti Sebelumnya	Penulis
1.	<i>Implementasi Program Pembangunan Drainase dalam upaya Penanggulangan Banjir Kota Medan (Siahaan AYS, 2019)</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Program Pembangunan Drainase di Kota Medan cukup responsif yakni pembangunan akan dilakukan sesuai dengan standar dan sasaran kebijakan. Tetapi penanggulangan tidak bisa satu instansi.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Program Pembangunan Drainase di Kota Pontianak cukup baik yakni pembangunan akan dilakukan sesuai dengan standar dan sasaran kebijakan. Penanggulangan bisa diatasi satu dinas yaitu dinas PUPR.
2.	<i>Peran Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru Dalam Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan di Kecamatan Tampan (Susilawati 2019).</i>	Kendala-kendala dalam penyelenggaraan sistem drainase perkotaan di Kecamatan Tampan antara lain Sumber daya Finansial tidak memadai seperti dana yang keluar sedikit dari anggaran, banyaknya ruko dan bangunan liar yang dibangun di sekitar drainase oleh masyarakat yang	Dalam penyelenggaraan drainase di kecamatan Pontianak Selatan Sumber Daya Finansial sudah memadai dikarenakan anggaran yang dikeluarkan untuk penyelenggaraan drainase ada, tetapi bangunan liar yang dibangun menyebabkan penyempitan drainase.



		menyebabkan penyempitan drainase	
3.	Implementasi program pengendalian banjir sub komponen c di kota semarang (program perbaikan sistem drainase kali semarang) (YB Persada A Rengga Maesaroh Maesaroh, 2015).	Hambatan disebabkan oleh faktor sumber daya manusia, tim pelaksana yang belum memahami standar dan sasaran pelaksanaan program, serta minimnya peran serta masyarakat yang disebabkan oleh kondisi sosial dan ekonomi.	Hambatan juga dialami namun dalam faktor sumber daya manusia dan tim pelaksana penyelenggaraan drainase sudah banyak yang memahami standar dan sasaran pelaksanaan walaupun masih ada yang belum paham.
4	Manajemen Perkotaan (Studi Kasus Penataan Drainase di Kota Pekanbaru) (Fawahid A Mashur D, 2016).	Kapasitas drainase lebih kecil dari banjir bibit dan membuat bingung air dari saluran karena drainase ditingkatkan dan konstruksi struktur drainase yang tidak merata.	Kapasitas drainase sudah cukup dan sesuai standar dikarenakan kota Pontianak dijuluki kota seribu parit. Kontruksi drainase yang ada pun sudah merata.
5	Implementasi Program Pembangunan Drainase sebagai Public Goods di Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Kabupaten Asahan (Lubis, Y Yasmin, 2019).	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Program Pembangunan Drainase sebagai Public Goods belum stabil, dalam penelitian yang sudah terbangun masih ada yang tidak bisa menampung debit air yang berlebih. Artinya pemerintah belum bisa membuat pembangunan ini secara baik dan benar terkait rancangan induknya.	Pembangunan drainase sudah dilakukan secara baik dibuktikan dengan daya tampung drainase cukup namun dikarenakan adanya sampah yang menghambat membuat banjir rob terjadi.

#### IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa Implementasi Penanggulangan Banjir Rob Melalui Program Penyelenggaraan Drainase Di Kecamatan Pontianak Selatan Oleh Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat sudah berjalan dengan baik namun masih ada terdapat hambatan. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap Implementasi Penanggulangan Banjir Rob Melalui Program Penyelenggaraan Drainase Di Kecamatan Pontianak Selatan Oleh Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat:

- a. Peraturan daerah Kota Pontianak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Drainase.
- b. Tempat penyelenggaraan drainase khususnya drainase parit tokaya yang ada di kecamatan pontianak selatan.
- c. Respon yang baik dari masyarakat akan pentingnya saluran drainase untuk menciptakan lingkungan yang sehat dan bebas genangan.
- d. Semangat dari OPD yang ditunjuk sebagai penyelenggara drainase untuk mendukung kebijakan walikota melalui Peraturan Daerah yang dibuat.

Penulis juga menyarankan kepada Pemerintah Kota Pontianak agar Memaksimalkan sosialisasi kepada masyarakat agar mengetahui kebijakan penyelenggaraan drainase sehingga akan tumbuh kesadaran bagi masyarakat untuk mendukung penyelenggaraan drainase. Sosialisasi dapat diberikan sejak dini di usia anak-anak dengan media pembelajaran di sekolah dan melakukan penyuluhan kepada masyarakat terkait saluran drainase.

## V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Dinas PUPR beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

## VI. DAFTAR PUSTAKA

### Buku – Buku

- Agus, Erwan Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyastuti. 2012. Implementasi Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gava Media.
- Moleong, L. 2014. Metodologi Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nazir. 2014. Metode Penelitian. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Sugiyono. 2017, Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan R&D, Bandung: Alfabeta
- Wahab, Solichin Abdul. 2012. Analisa Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Winarno, Budi. 2007. Kebijakan Publik Teori dan Proses. Yogyakarta: Med Press.

### Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
- Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Drainase Kota Pontianak
- Peraturan Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penulisan Laporan Akhir dan Skripsi Tahun Akademik 2017/2018

### Jurnal Internet

- Siahaan, AYS. 2019. *Implementasi Program Pembangunan Drainase dalam upaya Penanggulangan Banjir Kota Medan*. Diakses pada 25 Juni 2021 di <http://repositori.usu.ac.id>
- Susilawati. 2019. *Peran Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru Dalam Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan di Kecamatan Tampan*. Diakses pada 25 Juni 2021 di [http:// repository.uin-suska.ac.id](http://repository.uin-suska.ac.id)
- Persada, YB. 2015. Implementasi program pengendalian banjir sub komponen c di kota semarang (program perbaikan sistem drainase kali semarang). *Journal of Public Policy*. Diakses pada 25 Juni 2021 di <http://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/view/8908>
- Fawahid, A. 2016. Manajemen Perkotaan (Studi Kasus Penataan Drainase di Kota Pekanbaru). Diakses pada 25 Juni 2021 di <https://www.neliti.com/publications/206911/manajemen->

perkotaan-studi-kasus-penataan-drainase-di-kota-pekanbaru

Yasmin, Y. 2019. Implementasi Program Pembangunan Drainase sebagai Public Goods di Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Kabupaten Asahan. Diakseses pada 25 Juni 2021 di <http://repositori.usu.ac.id>

**Sumber Lain**

<https://pontianak.tribunnews.com/2019/09/23/pembangunan-turap-wajib-dilakukan-edi-sistem-utama-drainase-kota>